

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan, dapat disimpulkan bahwa program ini menghadapi berbagai tantangan dalam indikator *input*, proses, *output*, dan *outcome* kebijakan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam fenomena resistensi birokrasi dalam implementasi Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Jawa Tengah. Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, ditemukan bahwa resistensi birokrasi dalam program ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kepatuhan simbolis, pengabaian tugas, simplifikasi prosedur, hingga diskresi dalam pengambilan keputusan. Resistensi ini bukanlah bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan, tetapi lebih merupakan strategi adaptasi birokrat dalam menghadapi kebijakan yang mereka anggap kurang sesuai dengan kapasitas dan tupoksi masing-masing OPD.

Secara konseptual, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui intervensi lintas sektor oleh OPD pendamping. Namun, dalam implementasinya, berbagai kendala teknis dan struktural menyebabkan program belum optimal. Ketidakseimbangan dalam sumber daya, ketidakjelasan standar implementasi, serta minimnya evaluasi berbasis dampak menghambat keberhasilan program dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan ini masih memerlukan perbaikan signifikan agar

dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan bagi masyarakat desa dampingan.

Dari indikator *input*, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. OPD non-teknis sering kali tidak memiliki anggaran khusus untuk intervensi, sehingga mereka hanya dapat berkontribusi dalam bentuk koordinasi atau fasilitasi tanpa intervensi langsung yang berdampak signifikan. Ketidadaan anggaran ini membuat OPD non-teknis harus mencari sumber pendanaan lain seperti CSR atau Baznas, yang tidak selalu dapat diakses secara konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan, karena program ini tidak disertai dengan tambahan personel, sehingga pegawai OPD harus mengemban tugas tambahan di luar tanggung jawab utama mereka. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya insentif tambahan bagi pegawai yang menjalankan program, sehingga pelaksanaannya sering kali hanya menjadi beban tambahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi mereka yang bertugas.

Dari indikator proses, mekanisme kerja dan koordinasi antar-OPD masih mengalami banyak hambatan. Tidak adanya standar pelaksanaan dan target capaian yang jelas menyebabkan setiap OPD memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan program. Beberapa OPD yang memiliki manajemen lebih baik mampu menjalankan intervensi secara lebih terstruktur, sementara OPD lain hanya melakukan tugas sebatas formalitas administratif. Akibatnya, efektivitas program sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif masing-masing OPD, bukan pada sistem yang telah ditetapkan. Selain itu, resistensi birokrasi dalam bentuk kepatuhan palsu, pengabaian tugas, dan penyederhanaan prosedur semakin

menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. OPD cenderung lebih fokus pada pemenuhan aspek administratif dan laporan kegiatan daripada memastikan bahwa intervensi mereka benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa dampingan.

Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta seperti CSR dan BAZNAS, juga belum optimal. Banyak OPD non-teknis yang mengandalkan sumber pendanaan eksternal ini untuk menjalankan program, tetapi tidak semua OPD memiliki akses yang sama terhadap dana CSR atau bantuan dari lembaga sosial lainnya. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam efektivitas program antara OPD yang memiliki jaringan kuat dengan lembaga pendanaan eksternal dan OPD yang tidak memiliki akses yang memadai.

Dari indikator *output*, program ini telah menghasilkan berbagai bentuk intervensi seperti pembangunan RTLH, penyediaan sanitasi, bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan. Namun, ketimpangan dalam efektivitas intervensi antar-OPD menyebabkan tidak semua desa menerima manfaat yang merata. OPD yang memiliki anggaran dan kewenangan langsung dalam pengentasan kemiskinan cenderung memberikan intervensi yang lebih komprehensif dibandingkan OPD yang tidak memiliki peran teknis dalam program ini. Selain itu, banyak program yang hanya bersifat simbolis dan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Beberapa desa dampingan menerima intervensi yang lebih substansial dan terarah, sementara desa lain hanya mendapatkan bantuan yang sifatnya administratif atau simbolis tanpa dampak jangka panjang. Perbedaan ini semakin memperlebar ketimpangan dalam efektivitas program antar wilayah.

Dari indikator *outcome*, meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai kontribusi spesifik dari program ini dalam pencapaian tersebut. Program ini lebih banyak dipantau dari segi *output* administratif daripada *outcome* jangka panjang yang menunjukkan perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat desa dampingan. Kurangnya evaluasi berbasis dampak menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas program dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan pemantauan yang lebih berorientasi pada pencapaian laporan kegiatan daripada dampak program semakin memperumit upaya untuk menilai efektivitas intervensi secara menyeluruh.

Minimnya pendampingan lanjutan serta kurangnya integrasi dengan kebijakan pembangunan desa membuat banyak intervensi yang dilakukan bersifat sementara dan tidak memberikan dampak struktural dalam pengentasan kemiskinan. Program ini lebih terlihat sebagai proyek tahunan daripada kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada perubahan sistemik. Banyak desa yang setelah satu tahun pendampingan tidak lagi mendapatkan perhatian dari OPD pendamping, sehingga mereka harus mengelola sendiri keberlanjutan program tanpa dukungan lebih lanjut dari pemerintah provinsi.

Secara keseluruhan, meskipun program ini memiliki tujuan yang baik dalam mendukung pengentasan kemiskinan, berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Program ini masih perlu perbaikan dalam aspek perencanaan, mekanisme kerja, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta strategi keberlanjutan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat desa dampingan.

Evaluasi secara menyeluruh terhadap program ini menunjukkan bahwa meskipun telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural yang signifikan. Ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, ketidakjelasan mekanisme koordinasi, serta kurangnya standar pelaksanaan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program di lapangan. Tanpa adanya reformulasi kebijakan yang lebih sistematis, program ini berisiko menjadi sekadar proyek administratif tanpa dampak nyata dalam jangka panjang.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan guna memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi program meliputi kesenjangan dalam sumber daya, koordinasi yang belum optimal, serta kurangnya mekanisme evaluasi berbasis dampak. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pertama, perlu adanya penyelarasan kebijakan dengan tupoksi OPD agar intervensi yang dilakukan lebih relevan dan efektif. OPD yang tidak memiliki kapasitas teknis dalam pengentasan kemiskinan sebaiknya diberikan pedoman teknis yang lebih rinci agar dapat menjalankan perannya dengan optimal. Penyelarasan ini juga mencakup penyesuaian antara kewenangan OPD dengan bentuk intervensi yang dilakukan, sehingga OPD yang memiliki kapasitas teknis

lebih besar dapat diberikan peran yang lebih strategis. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi OPD sebelum program dijalankan untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas pendampingan serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif.

Kedua, perlu ada standarisasi dalam pelaksanaan program serta penegasan target capaian yang jelas. Standarisasi ini mencakup prosedur pelaksanaan, metode intervensi, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif. Setiap OPD harus memiliki indikator kinerja yang terukur agar dapat mengevaluasi keberhasilan intervensi yang telah dilakukan. Standarisasi ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap desa mendapatkan tingkat pendampingan yang setara, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam efektivitas program antar wilayah. Dengan adanya target capaian yang jelas, program dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mekanisme pemantauan dan evaluasi program perlu difokuskan pada *outcome*, bukan hanya *output* administratif. Evaluasi keberhasilan program harus berbasis pada dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar laporan administratif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang lebih komprehensif dan transparan agar efektivitas program dapat diukur secara lebih akurat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun sistem evaluasi berbasis indikator kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan pengurangan angka kemiskinan di tingkat desa. Pemantauan ini juga harus melibatkan pemerintah desa dan masyarakat agar proses evaluasi lebih partisipatif dan akuntabel.

Keempat, mekanisme koordinasi antara OPD perlu diperkuat agar program dapat berjalan lebih sinergis. Koordinasi ini tidak hanya melibatkan OPD di tingkat provinsi tetapi juga mencakup pemerintah kabupaten dan desa. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, diharapkan program dapat berjalan lebih efisien dan menghindari tumpang tindih intervensi antar-OPD. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta, lembaga sosial, serta organisasi masyarakat sipil juga perlu diperkuat agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan program. Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antarinstansi.

Kelima, kebijakan ini harus dilengkapi dengan strategi keberlanjutan agar intervensi yang dilakukan dapat terus memberikan dampak dalam jangka panjang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun mekanisme pendampingan berkelanjutan bagi desa setelah OPD menyelesaikan tugasnya. Pendampingan ini dapat berupa program pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas atau integrasi program dengan kebijakan pembangunan desa yang sudah ada. Dengan demikian, desa dampingan tidak hanya menjadi objek intervensi sesaat tetapi memiliki kapasitas untuk terus berkembang secara mandiri.

Selain rekomendasi kebijakan, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam memahami evaluasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis serta evaluasi berbasis dampak yang lebih kuat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih

dalam mengenai model evaluasi kebijakan yang dapat mengintegrasikan berbagai pendekatan, seperti evaluasi berbasis data longitudinal atau studi komparatif antarwilayah untuk melihat variasi efektivitas program.

Lebih lanjut, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, baik secara geografis maupun temporal. Studi mengenai efektivitas Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan dapat diperluas untuk mencakup seluruh daerah di Jawa Tengah dan dibandingkan dengan daerah lain yang menerapkan kebijakan serupa. Selain itu, evaluasi yang mencakup seluruh rentang waktu program dari tahun 2019 hingga 2024 dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih kontekstual dalam menggambarkan pola keberhasilan dan tantangan implementasi kebijakan di berbagai periode pemerintahan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan tetapi juga membuka peluang bagi penelitian akademis yang lebih luas dalam mengeksplorasi dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.